

Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mencegah Tawuran (Studi Deskriptif di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)

Waisul Kurni Maulidi¹ Damanhuri² Qotrun Nida³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: waisulfik@gmail.com¹ damanhuri@untirta.ac.id²

Abstract

This study aims to describe the Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat program in enhancing public awareness to prevent brawls in Kebon Jeruk and to identify the supporting factors as well as obstacles in its implementation. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the forum plays a significant role in early detection, routine monitoring, and cooperation with security forces. Supporting factors for the program's success include the synergy of human resources, coordination with the government and relevant institutions, and community participation. However, there are challenges such as limited operational support, members' busy schedules, and the low level of public understanding of their role. Overall, the forum has successfully raised awareness and encouraged community participation through effective communication and collaboration with stakeholders. Despite resource limitations, this initiative has created a safer environment.

Keywords: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, role, brawls, community participation, programs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tawuran di Kebon Jeruk dan mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum berperan signifikan dalam deteksi dini, monitoring rutin, dan kerja sama dengan aparat keamanan. Faktor pendukung keberhasilan program antara lain sinergi sumber daya manusia, koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan dukungan operasional, kesibukan anggota, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka. Secara keseluruhan, forum berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi efektif dan kolaborasi dengan pihak terkait, meski dengan keterbatasan sumber daya, upaya ini menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Kata Kunci: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, peran, tawuran, partisipasi masyarakat, program.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik sosial telah menjadi masalah yang meresahkan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Di tengah dinamika kompleks masyarakat perkotaan, konflik sosial sering kali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketegangan antar kelompok etnis atau agama, hingga tindakan kekerasan fisik seperti tawuran antar remaja (Latifah et al., 2022). Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah tawuran. Fenomena ini tidak hanya merusak ketertiban umum, tetapi juga mengancam keselamatan jiwadan harta benda masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Jawa Pos pada tahun 2023, sepanjang tahun 2022-2023 sebanyak 424 anak di Jakarta Barat terlibat dalam tindak pidana, termasuk tawuran antar pelajar (Hikmatiar, 2023) Selain itu, menurut laporan Kumbaran pada tahun 2022, Jakarta Barat mencatat jumlah kasus tawuran

tertinggi di Ibu Kota, melebihi daerah-daerah lain seperti Jakarta Selatan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran akan keamanan dan ketertiban terutama di Kecamatan Kebon Jeruk (Ginting, 2022). Kebon Jeruk dipilih sebagai fokus penelitian karena kawasan tersebut merupakan bagian dari Jakarta Barat, yang memiliki tingkat kasus tawuran antar pelajar dan konflik sosial yang cukup tinggi. Data dari Jawa Pos tahun 2023 dan Kumparan tahun 2022 menunjukkan bahwa Jakarta Barat, termasuk Kecamatan Kebon Jeruk, mengalami peningkatan kasus tawuran dan kejahatan yang melibatkan anak-anak dan pemuda. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam akar masalah konflik sosial ini, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi fenomena tawuran tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani konflik sosial seperti tawuran ini adalah melalui pendirian forum kewaspadaan dini masyarakat yang merupakan wadah partisipasi yang menggabungkan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga lokal dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik sosial. Dengan pendekatan kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, forum kewaspadaan dini masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani konflik sosial di tingkat komunitas (Ramadhan & Ahmad, 2023) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, menjadi dasar pembentukan Forum kewaspadaan dini masyarakat ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewaspadaan dini adalah “serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.” Yang dikategorikan sebagai ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) adalah “setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, forum kewaspadaan dini masyarakat terbentuk mulai dari pemerintah daerah tingkat provinsi, kemudian merujuk ke pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kemudian turun ke pemerintahan wilayah kecamatan, dan yang terakhir adalah terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat di pemerintahan tingkat kelurahan/desa. Masing-masing tingkatan pemerintah daerah ini memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan luas wilayahnya. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, 2019) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Forum kewaspadaan dini masyarakat di tingkat kecamatan bertugas untuk: Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan). Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

Forum kewaspadaan dini masyarakat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mencegah terjadinya konflik (Matropik, Ketua forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk, wawancara, 2024). Melalui kerja sama ini, forum kewaspadaan dini masyarakat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-

langkah pencegahan yang tepat. Forum kewaspadaan dini masyarakat telah dibentuk, namun eksistensinya masih belum maksimal sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan pengaduan. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini penting untuk pencegahan konflik sosial secara proaktif. Dengan deteksi dini potensi konflik oleh masyarakat, forum dapat menjadi sistem peringatan dini yang efektif, mengidentifikasi dan menangani ancaman konflik sebelum mencapai eskalasi (Matropik, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk, wawancara, 2024). Partisipasi dalam forum kewaspadaan dini masyarakat dapat membantu masyarakat merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dengan terlibat dalam kegiatan pencegahan konflik sosial, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan ini juga dapat memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga untuk menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat (Hutagalung, 2022) Forum kewaspadaan dini masyarakat menghadapi tantangan saat melibatkan masyarakat dalam mencegah konflik sosial tawuran. Tantangan ini juga dapat menghambat keberhasilan upaya yang dilakukan. Tujuan pencegahan konflik sosial dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif antara forum kewaspadaan dini masyarakat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, forum kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan Kebon Jeruk sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui program-program edukatif yang relevan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menghentikan tawuran, diharapkan lingkungan di Kecamatan Kebon Jeruk akan lebih aman, harmonis, dan sejahtera (Naufal, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi dengan objek yang ada dan berusaha menampilkan apa adanya atau obyektif sesuai keadaan lapangan (Isnaini, 2024). Metode deskriptif adalah Prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian yang berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Rahmat & Harahap, 2021). Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022:9).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Organisasi

Struktur organisasi yang telah dibentuk mencerminkan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Charles O. Jones mengenai pentingnya organisasi sebagai wadah pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar program dapat memberikan dampak yang optimal. Struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota merupakan kerangka dasar yang memungkinkan koordinasi dan pelaksanaan program pencegahan konflik sosial berjalan secara terorganisasi. Pengelolaan suatu program membutuhkan struktur organisasi yang jelas sebagai sarana untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program. FKDM sebagai wadah masyarakat menjalankan fungsi ini dengan menempatkan anggota, masing-masing anggota bertugas memantau situasi sosial di kelurahan. Ketua dan Sekretaris, meskipun tidak memegang wilayah spesifik, bertugas untuk mengawasi keseluruhan wilayah kecamatan. Strategi penempatan anggota di setiap kelurahan memungkinkan FKDM untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, sebagaimana dijelaskan dalam teori Charles O. Jones. Dalam teori Charles O. Jones, sumber daya manusia adalah elemen kunci yang mendukung

kelancaran pelaksanaan program. FKDM memanfaatkan kehadiran anggotanya di lapangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, membuka jalur komunikasi yang efektif, dan memperoleh informasi yang akurat terkait potensi konflik sosial. Penempatan anggota yang tepat di kelurahan yang rawan konflik memungkinkan FKDM mengidentifikasi gejala awal kerawanan sosial dengan lebih cepat, sekaligus merancang langkah pencegahan yang lebih strategis. Dengan demikian, anggota FKDM tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator aktif yang membangun hubungan dengan warga dan pemerintah kelurahan.

Struktur FKDM telah dirancang untuk efisien, keterbatasan jumlah anggota dapat menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan tugas mereka. FKDM juga menunjukkan implementasi metode pengelolaan organisasi. Penempatan anggota yang berbasis wilayah dan pendekatan dalam berinteraksi dengan masyarakat menjadi metode yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program. Metode ini tidak hanya memungkinkan FKDM mengidentifikasi potensi konflik dengan lebih akurat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap FKDM. Dengan pendekatan ini, FKDM dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam mencegah konflik sosial, khususnya tawuran, di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan mengintegrasikan teori Charles O. Jones, pembahasan ini menyoroti bahwa struktur organisasi FKDM, sumber daya manusia, dan metode pelaksanaan program telah dirancang untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan konflik sosial. Namun, keberhasilan ini membutuhkan dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas organisasi maupun pengelolaan sumber daya secara strategis. Dengan pendekatan yang terorganisasi dan sumber daya yang memadai, FKDM dapat menjadi contoh dalam mempertahankan keamanan di masyarakat.

Interpretasi

Dalam teori Charles O. Jones tentang aktivitas interpretasi, implementor atau pelaksana program harus mampu menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sangat relevan dengan strategi deteksi dini yang diterapkan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan Kebon Jeruk. Keberhasilan FKDM dalam mencegah potensi konflik sosial, seperti tawuran, mencerminkan bagaimana para anggota FKDM dapat menginterpretasikan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Keberadaan anggota FKDM yang terlibat langsung dalam pemantauan dan interaksi dengan masyarakat menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman yang baik mengenai tugas yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, anggota FKDM berperan sebagai implementor yang tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan melihat gejala-gejala awal potensi konflik, tetapi juga mengkomunikasikan informasi tersebut secara efektif kepada pihak berwenang dan masyarakat.

Proses deteksi dini yang efektif, yang tidak hanya bergantung pada observasi tetapi juga interaksi langsung dengan masyarakat, sesuai dengan teori interpretasi Charles O. Jones yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi. Interaksi langsung ini memberikan akses kepada FKDM untuk lebih memahami dinamika sosial yang sedang berkembang, sehingga mereka dapat mengambil tindakan preventif sebelum konflik semakin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap gejala-gejala awal potensi konflik sangat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima oleh para implementor. Selain itu, penerapan deteksi dini yang melibatkan kerjasama erat dengan pihak berwenang memperlihatkan pentingnya koordinasi antara FKDM dan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah keamanan. Dalam hal ini, implementor FKDM berperan

sebagai penghubung yang menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada pihak berwenang, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat. Keberhasilan strategi deteksi dini ini tidak hanya terletak pada pemantauan situasi sosial tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat. FKDM sebagai agen deteksi dini dan fasilitator mampu menginterpretasikan informasi sosial dengan baik dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, sehingga menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pencegahan konflik. Hal ini mencerminkan bagaimana teori interpretasi dari Charles O. Jones dapat diterapkan dalam konteks deteksi dini, yaitu dengan menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang ada dan memastikan adanya komunikasi yang jelas untuk mencapai tujuan pencegahan konflik.

Secara keseluruhan, strategi deteksi dini FKDM di Kecamatan Kebon Jeruk menunjukkan bagaimana interpretasi yang baik terhadap tugas dan komunikasi yang efektif antara FKDM, masyarakat, dan pihak berwenang dapat menghasilkan tindakan preventif yang cepat dan akurat dalam mencegah konflik sosial, seperti tawuran. Dalam konteks teori interpretasi Charles O. Jones, strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah konflik sosial, termasuk tawuran, dapat dijelaskan melalui proses interpretasi yang dilakukan oleh anggota FKDM dalam menjalankan tugas mereka. Jones berpendapat bahwa implementor harus dapat menginterpretasikan tugasnya sesuai dengan tujuan dan pedoman yang ditetapkan, yang juga berlaku bagi FKDM dalam menjalankan strategi mereka. Sistem pelaporan yang terstruktur menjadi salah satu komponen penting dalam strategi FKDM. Menurut teori interpretasi Jones, pelaksana program (dalam hal ini anggota FKDM) harus mampu menginterpretasikan dan menyampaikan informasi yang akurat dan relevan, serta memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dengan pelaporan rutin melalui berbagai media komunikasi, seperti rapat koordinasi, telepon, atau platform komunikasi elektronik seperti WhatsApp, anggota FKDM dapat menyampaikan informasi mengenai kejadian yang berpotensi memicu konflik. Hal ini menunjukkan bagaimana FKDM menginterpretasikan informasi yang diterima dari masyarakat dan memanfaatkannya untuk mencegah eskalasi konflik.

Pentingnya verifikasi informasi sesuai dengan teori interpretasi Jones menunjukkan bahwa implementor (FKDM) harus memastikan bahwa data yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dan valid sebelum ditindaklanjuti. Proses verifikasi informasi yang meliputi pengecekan lokasi, relevansi kejadian, dan keandalan sumber informasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berdasarkan informasi yang salah, yang sesuai dengan prinsip interpretasi yang baik dalam teori Jones. Hal ini juga mempengaruhi efektivitas strategi pencegahan yang diterapkan oleh FKDM. Koordinasi antarlevel FKDM yang dilakukan melalui rapat rutin dan penggunaan platform teknologi komunikasi juga mencerminkan bagaimana interpretasi informasi di seluruh lapisan organisasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dalam teori Jones, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana program di berbagai tingkatan adalah kunci untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penggunaan teknologi seperti WhatsApp mempermudah penyampaian informasi secara cepat dan efisien, sehingga mempercepat respons terhadap potensi konflik. Penggunaan teknologi komunikasi juga menunjukkan bagaimana interpretasi terhadap dinamika sosial yang ada di masyarakat dipercepat dan diperkuat. Dengan komunikasi yang efektif dan sistem pelaporan yang terstruktur, FKDM mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik. Dalam teori interpretasi Jones, ini menggambarkan bagaimana anggota FKDM harus dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang ada dan mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi yang aktif. Secara

keseluruhan, penerapan teori interpretasi Charles O. Jones dalam konteks strategi FKDM menunjukkan pentingnya interpretasi yang baik terhadap informasi dan komunikasi yang efektif. FKDM, melalui sistem pelaporan, verifikasi informasi, koordinasi antarlevel, dan penggunaan teknologi komunikasi, berhasil melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan implementor untuk menginterpretasikan informasi yang diterima dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil berdasarkan pada data yang valid dan relevan.

Penerapan

Pelaksanaan program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan Kebon Jeruk berfokus pada upaya mencegah tawuran dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dan pencegahan potensi konflik sosial. Salah satu program utama yang diterapkan oleh FKDM adalah program monitoring rutin yang bertujuan untuk mendeteksi dini adanya potensi konflik yang dapat berkembang menjadi tawuran. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari FKDM, aparat keamanan, hingga masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program monitoring FKDM di Kecamatan Kebon Jeruk telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terstruktur. FKDM telah menetapkan prosedur kerja yang jelas dalam melaksanakan monitoring, mulai dari pemantauan di tingkat kelurahan hingga bekerja sama dengan aparat keamanan seperti polisi dan TNI untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Program ini tidak hanya melibatkan pengawasan dari instansi eksternal, tetapi juga mengandalkan partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi terkait kondisi di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip Charles O. Jones tentang perlunya prosedur yang jelas agar program dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, pentingnya jadwal kegiatan yang terorganisir juga tercermin dalam pelaksanaan program monitoring ini. Monitoring dilakukan secara teratur dan terjadwal, dengan pemantauan yang lebih intensif di waktu-waktu rawan, seperti malam hari atau saat menjelang perayaan, yang seringkali menjadi waktu terjadinya tawuran. Keberadaan jadwal kegiatan yang jelas memastikan bahwa program monitoring tidak terhambat oleh gangguan lain dan dapat berjalan berkelanjutan tanpa benturan dengan program lain. Melalui jadwal yang terorganisir, FKDM dapat terus memantau dan mendeteksi potensi konflik dengan lebih efektif.

Konsistensi monitoring yang diterapkan oleh FKDM juga sangat penting, sesuai dengan apa yang ditekankan oleh Charles O. Jones dalam teorinya. Monitoring yang dilakukan oleh FKDM di Kecamatan Kebon Jeruk menunjukkan upaya yang konsisten dalam memantau pergerakan kelompok atau individu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Program ini dilakukan secara rutin dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai potensi ancaman, sehingga program monitoring dapat berjalan lebih efisien. Namun, tantangan dalam hal ketepatan informasi dan keterbatasan sumber daya manusia seringkali menghambat efektivitas program ini. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak juga menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program monitoring. FKDM bekerja sama dengan RW dan aparat keamanan untuk memastikan bahwa setiap potensi kerawanan sosial dapat teridentifikasi dan diatasi dengan cepat. Meskipun FKDM telah berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik, hambatan komunikasi antara FKDM dan RW masih sering terjadi, yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sumber daya manusia agar komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait dapat berjalan lebih lancar. Secara keseluruhan, meskipun program monitoring yang diterapkan oleh FKDM di Kecamatan Kebon

Jeruk telah menunjukkan hasil yang positif dalam mencegah tawuran, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan dalam hal komunikasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya akan semakin meningkatkan efektivitas program ini. Keberhasilan program monitoring sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif, serta seberapa baik koordinasi antar lembaga dapat dijalin untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, FKDM telah berperan penting dalam pencegahan tawuran di Kecamatan Kebon Jeruk melalui program monitoring yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan informasi dan kendala koordinasi antar lembaga, FKDM terus berupaya memperbaiki pelaksanaan program ini dengan melibatkan lebih banyak pihak dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Keberhasilan program monitoring akan semakin terlihat jika masyarakat semakin terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mereka, serta jika koordinasi antar lembaga berjalan lebih efektif dan efisien. Faktor pendukung meliputi sinergi sumber daya manusia yang terlibat, koordinasi baik antara FKDM, pemerintah, dan lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Sinergi anggota FKDM memastikan respons cepat terhadap potensi konflik, sedangkan koordinasi rutin dengan pemerintah dan lembaga lain memfasilitasi evaluasi program dan strategi baru. Partisipasi masyarakat juga meningkat melalui edukasi dan komunikasi aktif. Namun, berbagai hambatan masih menghalangi keberhasilan program, seperti keterbatasan dukungan operasional, kesibukan anggota FKDM, kurangnya intensitas monitoring, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan. Pendanaan yang terbatas mengurangi cakupan program, sementara kesibukan anggota dan minimnya jam monitoring membatasi efektivitas pengawasan. Selain itu, sebagian masyarakat kurang menyadari peran mereka dalam mencegah tawuran. Untuk itu, diperlukan dukungan operasional lebih lanjut dari pemerintah, pengelolaan waktu yang lebih baik, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan.

KESIMPULAN

Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan Kebon Jeruk telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah konflik sosial, terutama tawuran. Program berbasis wilayah memungkinkan deteksi dini potensi konflik melalui penguatan koordinasi dengan masyarakat, monitoring rutin, dan komunikasi yang efektif. Kolaborasi FKDM dengan pemerintah, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat turut mempercepat respons terhadap potensi kerawanan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi konflik menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Pelaksanaan program masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan dana dan sumber daya operasional, kesibukan anggota FKDM yang membatasi waktu mereka untuk fokus pada tugas pencegahan, kurangnya jam monitoring, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi dan pelibatan masyarakat yang lebih intensif. Dengan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pihak terkait, FKDM mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memperkuat ketahanan sosial di Kecamatan Kebon Jeruk.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, T. V. (2022, October 13). Bukan Jaksel, Kasus Tawuran Terbanyak di Ibu Kota Justru Ada di Jakbar. Kumparan.<https://jakarta.bps.go.id/>

- Hikmatiar, T. R. (2023, July 2). Di Jakarta Barat, 424 Anak Jadi Pelaku Tindak Pidana Sepanjang Tahun 2022-2023. JawaPos.Com.
- Hutagalung, S. S. (2022). Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Isnaini, N. A. (2024). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2022 (Studi Deskriptif Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penugasan dari Gubernur Kepada PT. Transportasi Jakarta Mengenai Integrasi Transportasi Umum) [Thesis]. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Latifah, A. N., Dewi, A., Furnamasari, Y. F., Kunci, K., Toleransi, :, & Sekolah, A. U. (2022). Pentingnya Menumbuhkan Sikap Toleransi pada Anak Usia Sekolah di Indonesia: Negeri Multikultural The Importance of Fostering Tolerance in School- Age Children in Indonesia: A Multicultural Country (Vol. 6, Issue 1).
- Naufal, B. A. D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Mencegah Konflik Sosial di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pub. L. No. 13 (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, Pub. L. No. 46 (2019).
- Rahmat, & Harahap, A. K. Z. (2021). Kegiatan Sumber Daya Manusia Terhadap Softskill Keberadaan Undang-Undang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan. Jurnal LPPM UGN, 11.
- Ramadhan, A. A., & Ahmad, M. (n.d.). Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara Implementation of the Community Early Awareness Forum in Handling Social Conflict in Warakas Village, North Jakarta. In Provider Jurnal Ilmu pemerintahan (Vol. 2, Issue 2).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. ALFABETA.